



Buku Saku

Mendekha Belajar

Prinsip dan Implementasi pada Jenjang Pendidikan SMA

JAUHI
NARKOBA
RAIH
PRESTASI



PENGANTAR

Buku saku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan di level pemerintah daerah dan sekolah tentang prinsip dan implementasi kebijakan merdeka belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kami berharap buku saku ini bisa menjadi referensi bagi administrator Pendidikan pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, orangtua siswa, dan siswa dalam tahap perancangan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Merdeka Belajar, khususnya jenjang Pendidikan SMA.



Buku saku ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki dan diperbaharui sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku saku ini.

a.n. Plt. Direktur Jenderal
PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Direktur Sekolah Menengah Atas,



Purwadi Sutanto
NIP. 196104041985031003

Daftar Isi

6

Prinsip Kebijakan Merdeka Belajar

11

**Implementasi Kebijakan
Merdeka Belajar Jenjang Pendidikan SMA
(Kebijakan Episode 1 dan 3)**

28

**Program-program Direktorat SMA
dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar**

51

**Strategi & Kunci Keberhasilan Implementasi
Kebijakan Merdeka Belajar**



PRINSIP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR



Apa **inti** Kebijakan Merdeka Belajar?

Merdeka Belajar adalah kebijakan terobosan yang diluncurkan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, yang bertujuan untuk mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah daerah.

Otoritas pengelolaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan pemerintah pusat dalam usaha mencapai tujuan nasional pendidikan.



Apa **tujuan** utama pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar?

Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional Pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan pada siswa-siswi yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi khususnya dalam literasi dan numerasi.

Kenapa harus Merdeka Belajar?

a)

Peraturan Pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan mengikat, contoh: aturan terkait UN, aturan RPP, aturan penggunaan dana BOS dan lainnya. Peraturan tersebut terbukti tidak efektif untuk mencapai tujuan nasional Pendidikan;

b)

Ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional Pendidikan terlihat pada hasil belajar siswa di komparasi test internasional (contoh: PISA) yang menunjukkan siswa-siswi kita masih lemah dalam aspek penalaran tingkat tinggi khususnya dalam hal literasi dan numerasi;

c)

Kebijakan Merdeka Belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat (fleksibel) diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi, tantangan dan permasalahan Pendidikan yang berbeda antar sekolah, dengan strategi penyelesaian yang berbeda.

Apa **manfaat** pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar?

a)

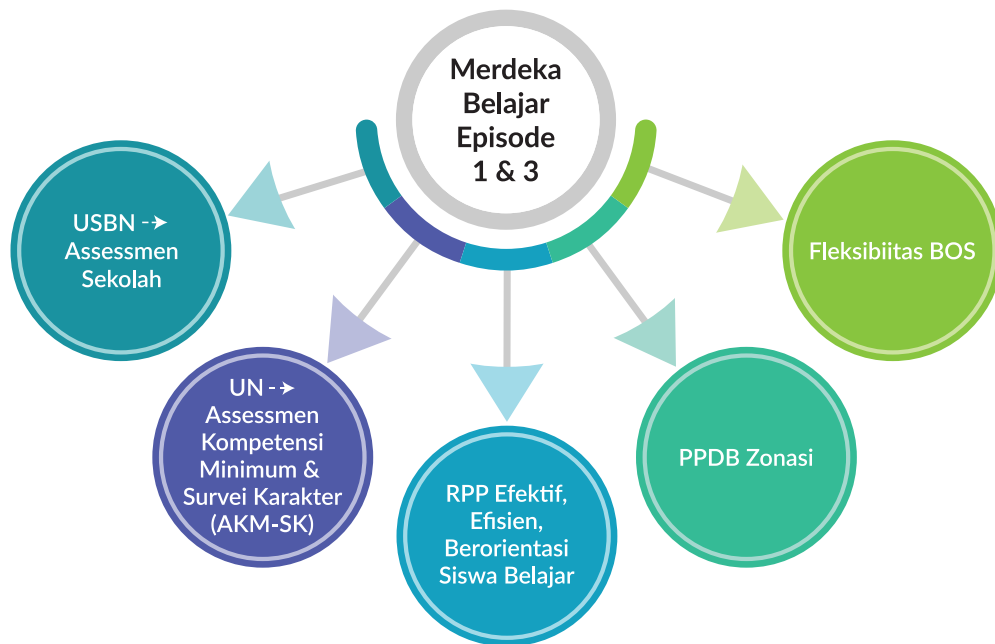
Kepala sekolah, guru, orang tua dan pemerintah daerah dapat bergotong-royong untuk mencari dan menemukan solusi yang efektif, efisien dan cepat terhadap kondisi, tantangan dan permasalahan Pendidikan di masing-masing sekolah khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar siswa;

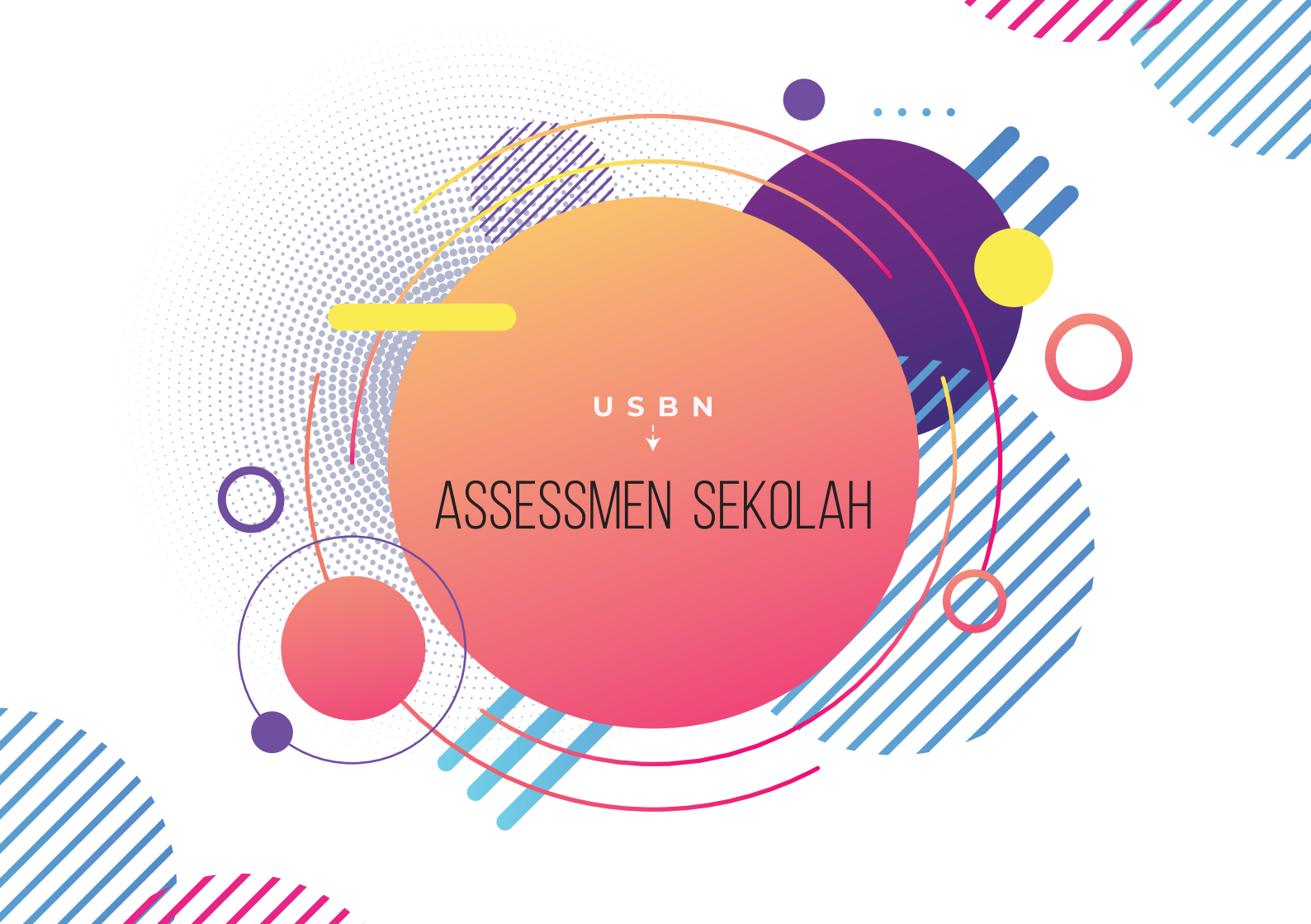
b)

Kepala sekolah, guru, orang tua dan pemerintah daerah merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Pendidikan di sekolah pada daerah masing-masing;

**IMPELEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA
BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN SMA
(KEBIJAKAN EPISODE 1 DAN 3)**

Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar





U S B N



ASSESSMEN SEKOLAH

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi Assessmen Sekolah (1)

Alasan & Tujuan

Mengembalikan **hak** menilai (assess) proses dan hasil belajar siswa kepada sekolah;

a)

Memberikan **tanggung jawab** kepada sekolah untuk menilai (assess) hasil belajar siswa mengacu pada standar proses;

b)

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi Assessmen Sekolah (2)

Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya

a) Sekolah

- 1) Memfasilitasi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam penilaian proses dan hasil belajar siswa;
- 2) Memfasilitasi guru dalam menentukan strategi yang dapat mengukur kompetensi bernalar siswa, dapat melalui tes tertulis, penugasan, portofolio, project kolaboratif, dan instrumen penilaian lain;
- 3) Memfasilitasi guru untuk melakukan penilaian yang dapat memberikan *feedback* kepada individual siswa terhadap proses belajar mereka, dan guru terhadap proses mengajar, sehingga setiap individual siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuan mereka memahami konten pelajaran.

b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)

- 1) menyusun dan mendesiminasi program untuk peningkatan kualitas penilaian sekolah, baik formatif dan sumatif.

c) Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) berkoordinasi dengan Kemdikbud untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penilaian proses dan hasil belajar siswa.



U N



ASSESSMEN KOMPETENSI MINIMUM &
SURVEI KARAKTER
(AKM-SK)

Ujian Nasional menjadi Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (AKM-SK) (1)

Alasan & Tujuan

- a) Nasional assessment (contoh ujian nasional) pada hakikatnya adalah instrument penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian sistem Pendidikan nasional, bukan sekolah, apalagi prestasi siswa;
- b) AKM-SK adalah sebuah instrument penilaian yang mempunyai satu fungsi, yaitu untuk mengukur kinerja sistem Pendidikan nasional, berbeda dengan ujian nasional;
- c) Ujian nasional adalah sebuah instrument penilaian yang digunakan untuk berbagai fungsi, mengukur kinerja siswa, sekolah, dan nasional; (ini tidak tepat mengacu pada teori penilaian);
- d) AKM-SK mengukur literasi, numerasi dan karakter, sehingga secara tidak langsung memotivasi guru dan siswa berfikir kritis;
- e) Ujian nasional hanya mengukur kemampuan siswa yang sifatnya penguasaan konten pelajaran atau penalaran tingkat rendah.

Ujian Nasional menjadi Assessmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (AKM-SK) (2)

Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya

a) Sekolah

- 1) Sekolah tidak perlu persiapan khusus dalam pelaksanaan AKM-SK (tidak seperti ujian nasional dimana ada tambahan jam pelajaran), namun demikian;
- 2) Sekolah perlu meningkatkan kualitas proses belajar siswa, berfokus pada penalaran kritis, hal ini adalah tugas utama sekolah;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan komputer, tidak hanya untuk pelaksanaan AKM-SK, tapi juga untuk kegiatan belajar siswa.

b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) menyusun dan mendesiminasi informasi untuk pelaksanaan AKM-SK kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah.

c) Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan sekolah untuk pelaksanaan AKM-SK;
- 2) memfasilitasi sekolah dalam pelaksanaan AKM-SK.



RPP EFEKTIF, EFISIEN, BERORIENTASI
SISWA BELAJAR

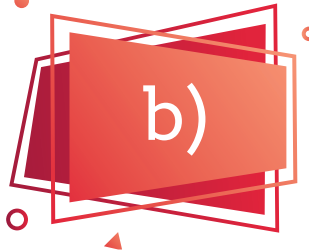
Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) yang Efektif, Efisien, Berorientasi Belajar Siswa (1)

Alasan & Tujuan

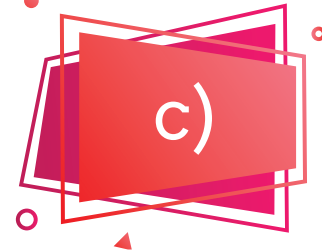
RPP konvensional seringkali menjadi beban administratif dan menyita banyak waktu guru karena sangat detail dan tebal,



RPP harusnya disusun secara efektif, efisien, dan berorientasi ke belajar siswa;



RPP pada intinya memuat tujuan dan metode pembelajaran serta metode penilaian.



Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) yang Efektif, Efisien, Berorientasi Belajar Siswa (2)

Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya

a) Sekolah

- 1) Memfasilitasi guru untuk menyusun RPP yang efektif, efisien, dan berorientasi terhadap kebutuhan siswa belajar;
- 2) Memfasilitasi guru menggunakan waktu yang tersita karena beban administratif untuk digunakan pada kegiatan yang efektif terhadap peningkatan kualitas belajar siswa;

b) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

- 1) menyusun dan mendesiminasi RPP Merdeka Belajar ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah.

c) Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) berkoordinasi dengan kementerian Pendidikan dan sekolah untuk penyusunan RPP Merdeka Belajar serta pelaksanaan pembelajaran sekolah;
- 2) memfasilitasi sekolah dalam penyusunan RPP Merdeka Belajar dan pelaksanaan pembelajaran sekolah.

An abstract graphic design featuring a central orange-to-pink gradient circle containing the text "PPDB ZONASI". Surrounding this central circle are various geometric elements: a purple circle with a yellow horizontal bar, a yellow circle, a pink circle, and several smaller circles in purple, yellow, and pink. The background is decorated with blue and pink diagonal stripes, a halftone dot pattern, and thin curved lines in orange, yellow, and pink. The overall style is modern and colorful.

PPDB ZONASI

Kebijakan PPDB Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 (1)

Permendikbud 44 / 2019 mengatur tentang PPDB:

- a) Jalur Zonasi min 50%;
- b) Jalur Afirmasi min 15%;
- c) Jalur Perpindahan max 5%
- d) Jika ada kuota sisa dapat dibuka jalur prestasi max 30%. Kriteria siswa berprestasi dapat didasarkan pada prestasi akademik dan non-akademik.

Alasan & Tujuan

- a) Kebijakan PPDB Zonasi lama tidak memberikan fleksibilitas bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah (jalur zonasi min 80%);
- b) Kebijakan PPDB Zonasi baru memberikan fleksibilitas kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah (jalur zonasi min 50%) sehingga PPDB dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
- c) Tujuan utama Zonasi Pendidikan tetap dapat tercapai, yaitu menjamin hak anak untuk memperoleh Pendidikan, terlepas dari prestasi dan status sosial (*equal opportunity*);
- d) Mempersempit kesenjangan kualitas antar sekolah karena input siswa yang homogen (siswa berprestasi bersekolah di SMA favorit).

Kebijakan PPDB Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 (2)

Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya:

a) Sekolah

- 1) Memfasilitasi guru untuk dapat melakukan metode pembelajaran yang sesuai bagi semua siswa terlepas dari kecepatan belajarnya (*differentiated instruction*), karena sekolah akan mendapatkan input siswa yang heterogen.

b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Menyusun, mendesiminasi, dan mengevaluasi kebijakan PPDB Zonasi melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah.

c) Dinas Provinsi Provinsi

- 1) Menyusun dan menetapkan zonasi Pendidikan sesuai dengan kondisi daerah;
- 2) Menyusun dan menentukan aturan kuota zonasi berdasarkan kondisi daerah.
- 3) Melakukan sosialisasi ketentuan zonasi dan kuota zonasi kepada kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan unsur lain yang relevan termasuk latar belakang penentuan zonasi dan kuota zonasi.
- 4) Melaporkan pelaksanaan PPDB zonasi kepada Kemdikbud.

An abstract graphic design featuring a central orange-to-pink gradient circle containing the text 'FLEKSIBIITAS BOS'. Surrounding this central circle are various geometric elements: a purple circle with a yellow horizontal bar, a yellow circle, a pink circle, and several smaller circles in purple, yellow, and pink. The background is decorated with blue and pink diagonal stripes, a halftone dot pattern, and thin curved lines in orange, yellow, and pink. The overall style is modern and vibrant.

FLEKSIBIITAS BOS

Penggunaan Dana BOS yang lebih Fleksibel (1)

Permendikbud 8 dan 19 Tahun 2020 tentang BOS:

- a) Penyaluran langsung dari Kemkeu ke Rekening Sekolah;
- b) Peningkatan satuan biaya BOS per siswa;
- c) Penggunaan dana yang lebih fleksibel (tidak ada pembatasan) dan max 50% bisa digunakan untuk honor guru non ASN sesuai ketentuan (kecuali dimasa pandemi covid-19);
- d) Laporan jadi syarat penyaluran.

Alasan & Tujuan

- a) Dana BOS diterima sekolah secara tepat waktu sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terganggu;
- b) Dana BOS digunakan secara fleksibel sehingga kebutuhan sekolah dapat terpenuhi;
- c) Kesejahteraan guru honorer diperhatikan;
- d) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS meningkat.

Penggunaan Dana BOS yang lebih Fleksibel (2)

Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya:

a) Sekolah

- 1) Mengelola dana BOS secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- 2) Pengelolaan dana BOS difokuskan untuk menyediakan layanan Pendidikan bagi siswa menitikberatkan pada peningkatan kualitas belajar siswa.

b) Kementerian Pendidikan

- 1) Menyusun, mendesiminasi, dan mengevaluasi pelaksanaan BOS melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah.

c) Dinas Pendidikan Provinsi

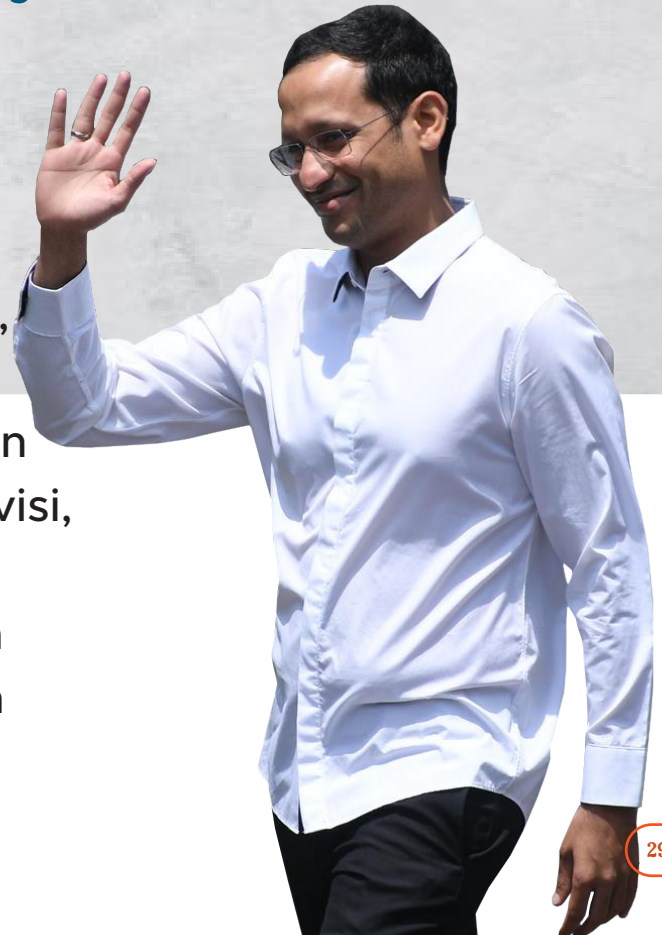
- 1) Berkoordinasi dengan sekolah untuk kelancaran penyaluran dana BOS meliputi entri data sekolah ke aplikasi dapodik, laporan penggunaan dana BOS oleh sekolah tepat waktu ke aplikasi BOS salur;
- 2) Berkoordinasi dengan sekolah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas penggunaan dana BOS.

**PROGRAM-PROGRAM DIREKTORAT
SMA DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR**

Permendikbud 9/2020 tentang Organisasi & Tata Kerja

Direktorat SMA bertugas dalam:

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola & penilaian SMA





Di mana ada kebebasan di situ harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh disiplin itu disiplin diri, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya.
Dan peraturan yang disetujui harus ada di dalam suasana yang merdeka.

Ki Hajar Dewantara

BISNIS PROSES PELAKSANAAN PROGRAM

Objective: peningkatan kualitas tata kelola sekolah dalam domain pengelolaan BOS, pemenuhan sarana prasarana, kualitas pembelajaran, dan peserta didik dalam kerangka kebijakan merdeka belajar

Direktorat SMA (Role):

- Fasilitasi program melalui koordinasi & kolaborasi dengan Dinas Pendidikan & Sekolah;
- Evaluasi implementasi program di level Dinas & Sekolah.

Dinas Pendidikan Provinsi (Role):

- Fasilitasi program melalui koordinasi & kolaborasi dengan Sekolah;
- Evaluasi implementasi program di level sekolah;

Sekolah
Program peningkatan
kualitas pengelolaan
BOS SMA

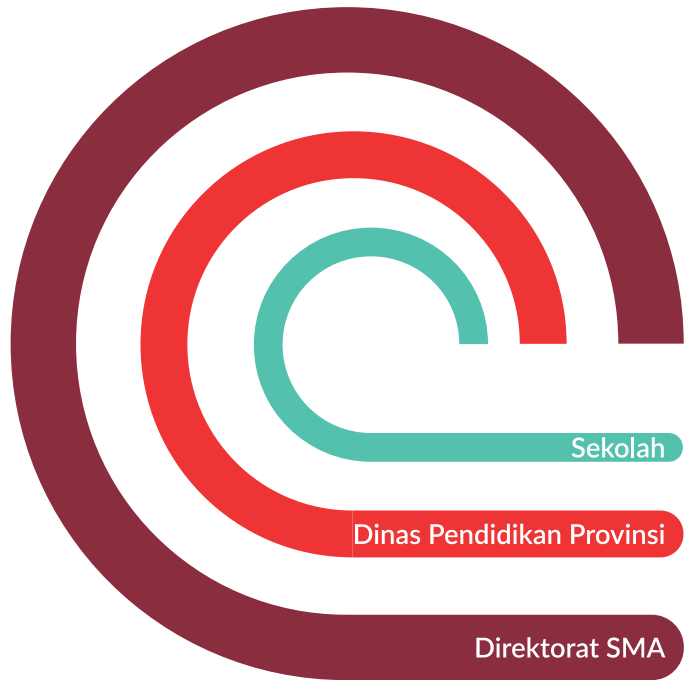
Sekolah
Program pemenuhan
sarana dan prasarana
SMA

Sekolah
Pelaksana program
peningkatan kualitas
penilaian SMA

Sekolah
Program peningkatan
kualitas layanan
Pendidikan
bagi peserta didik SMA

Sekolah
Program peningkatan
kualitas tata kelola SMA

Tugas & Tanggung Jawab Stakeholder Pendidikan



Masyarakat dan orang tua siswa terlibat aktif dalam peningkatan kualitas layanan Pendidikan di sekolah (dapat mengacu pada zonasi sekolah).

Bertugas meningkatkan kualitas layanan Pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas belajar siswa dan bertanggung jawab terhadap kinerja sekolah.

Bertugas melakukan fasilitasi peningkatan kualitas layanan Pendidikan di sekolah dan bertanggung jawab terhadap kinerja Pendidikan daerah.

Bertugas melakukan fasilitasi peningkatan kualitas layanan Pendidikan di daerah dan sekolah serta bertanggung jawab terhadap kinerja Pendidikan nasional jenjang SMA.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola BOS SMA (1)

Rasional Program

- a) Belum semua SMA dapat melakukan perencanaan penggunaan dana BOS secara efektif & Efisien (*Spending Quality*);
- b) Efektivitas & efisiensi pengelolaan dana BOS bisa menjadi faktor yang berpengaruh pada peningkatan proses belajar siswa;
- c) Data jumlah siswa yang menjadi pertimbangan pengalokasian dana BOS belum sepenuhnya valid;
- d) Laporan penggunaan dana BOS dari Sekolah belum sepenuhnya disampaikan (baru sekitar 53% sekolah mengirimkan laporan).

Tujuan Program

- a) Pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien oleh sekolah sehingga dapat bermanfaat untuk penyediaan layanan Pendidikan yang baik bagi siswa dan peningkatan kualitas belajar siswa;
- b) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah sehingga kepercayaan orang tua siswa, Dinas Pendidikan, dan Direktorat meningkat.

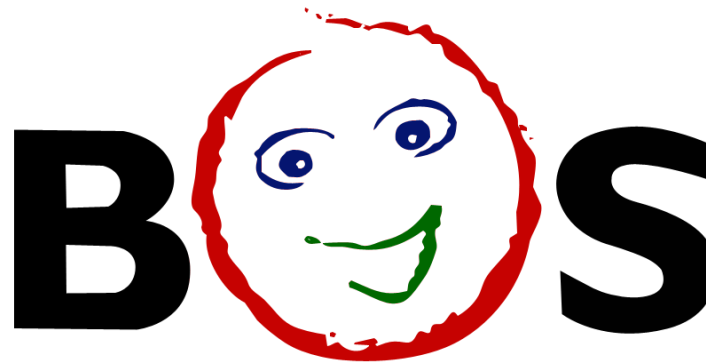
Peningkatan Kualitas Tata Kelola BOS SMA (2)

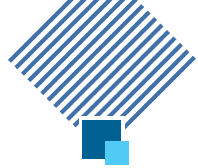
Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya:

- a) Direktorat SMA
 - 1) Menyusun norma dan prosedur pengelolaan BOS yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - 2) Mendesiminasikan norma dan prosedur tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah;
 - 3) Melakukan evaluasi pengelolaan dana BOS oleh sekolah;
 - 4) Melakukan perbaikan terhadap pengelolaan dana BOS berdasarkan evaluasi tersebut.
- b) Dinas Pendidikan Provinsi
 - 1) Berkolaborasi dengan Direktorat SMA untuk menginformasikan norma dan prosedur pengelolaan BOS yang efektif, efisien, dan akuntabel kepada sekolah;
 - 2) Melakukan supervisi ke sekolah untuk peningkatan pengelolaan dana BOS yang efektif, efisien, akuntabel transparan (bisa dalam bentuk review RKAS sekolah, mendorong sekolah untuk menyampaikan laporan);
 - 3) Berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Direktorat dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS oleh sekolah.
- c) Sekolah
 - 1) Mencerna informasi norma dan prosedur pengelolaan dana BOS yang efektif, efisien, akuntabel yang disampaikan oleh Direktorat dan Dinas Pendidikan;
 - 2) Melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana BOS dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi.
 - 3) Menyampaikan data yang valid untuk keperluan penyaluran dana BOS dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Program-program Peningkatan Kualitas Pengelolaan BOS SMA (3)

- a) Penyusunan prosedur operasi standar pengelolaan dana BOS SMA yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b) Penyusunan prosedur operasi standar pelaporan dana BOS SMA;
- c) Penyusunan prosedur operasi standar validasi data untuk alokasi dana BOS SMA;
- d) Penyusunan evaluasi kinerja pengelolaan BOS (*performance score card*) per provinsi;
- e) Layanan pengaduan masyarakat (*call center*) BOS SMA.





Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana SMA (1)

Rasional Program

- a) Kualitas perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SMA masih belum baik;
- b) Dinas Pendidikan belum mempunyai rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SMA yang disusun secara sistematis;
- c) Kualitas hasil pembangunan sarana dan prasarana sekolah belum termonitor dengan baik;
- d) Komitmen untuk melaksanakan program DAK masih perlu ditingkatkan.

Tujuan Program

- a) Dinas Pendidikan mempunyai rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SMA yang disusun secara sistematis (mengacu pada data dapodik dan kebutuhan riil sekolah);
- b) Peningkatan komitmen pelaksanaan program DAK oleh Dinas Pendidikan sehingga lebih serius dalam mengelola program DAK;
- c) Direktorat mempunyai data untuk mengevaluasi kualitas hasil pembangunan sarpras fisik SMA.

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana SMA (2)

Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya

a) Direktorat SMA

- 1) Menyusun draft rencana pemenuhan kebutuhan sarpras SMA per Provinsi;
- 2) Berkoordinasi dengan provinsi dan sekolah dalam upaya meningkatkan komitmen daerah dan kualitas dalam pengelolaan DAK;
- 3) Melakukan monitoring hasil pelaksanaan pembangunan sarpras SMA melalui program DAK;
- 4) Melakukan evaluasi kinerja per Provinsi melalui *performance score card*.

b) Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) Menindaklanjuti draft rencana pemenuhan kebutuhan sarpras SMA dengan melakukan validasi data dapodik dan verifikasi sekolah;
- 2) Melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAK berkolaborasi dengan Direktorat;
- 3) Memastikan validitas data sarana prasarana sekolah di aplikasi dapodik;
- 4) Berkoordinasi dengan Direktorat untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan sarpras melalui DAK.

c) Sekolah

- 1) Melakukan update data sarana dan prasarana sekolah secara valid di aplikasi dapodik;
- 2) Menerima masukan dari Direktorat dan Dinas Pendidikan;
- 3) Melakukan perbaikan baik dalam pelaksanaan pembangunan dan perawatan sarpras SMA.

Program-program Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana SMA (3)

- 1) Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana SMA per Provinsi;
- 2) Penyusunan prosedur operasi standar pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang SMA;
- 3) Penyusunan evaluasi kinerja pengelolaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang SMA (*performance score card*);
- 4) Layanan pengaduan masyarakat (*call center*) program DAK Fisik SMA;
- 5) Identifikasi pemerataan akses Pendidikan SMA melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
- 6) Penyusunan standar pemeliharaan sarana dan prasarana SMA;
- 7) Penyusunan standar peralatan untuk kegiatan pembelajaran SMA.



Peningkatan Kualitas Penilaian SMA (1)

Rasional Program

- a) Perubahan dari USBN ke assessmen sekolah memerlukan penguatan kemampuan guru dalam penilaian proses dan hasil belajar siswa (*assessment literacy*);
- b) Sekolah masih memerlukan penguatan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa yang menitikberatkan pada kemampuan siswa berfikir kritis (4C);
- c) Penilaian yang dilakukan guru belum dapat memberikan *feedback* yang efektif bagi siswa untuk perbaikan proses belajar.

Tujuan Program

- a) Meningkatkan penguatan kapasitas guru dalam melakukan penilaian (*assessment literacy*);
- b) Guru memahami dan menggunakan metode-metode penilaian yang efektif untuk mengevaluasi perkembangan belajar siswa;
- c) Penilaian yang dilakukan guru (dalam proses siswa belajar) dapat memberikan *feedback* yang memotivasi siswa untuk melakukan perbaikan.

Peningkatan Kualitas Penilaian SMA (2)

Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya

a) Direktorat SMA

- 1) Menyusun norma dan prosedur penilaian Pendidikan yang efektif bagi guru. Norma dan prosedur tersebut berisikan konten metode penilaian Pendidikan (tes tertulis, penugasan, portofolio, project) secara utuh dan menyeluruh untuk perbaikan belajar siswa;
- 2) Menyusun pola dan mekanisme penilaian yang menitikberatkan pada kemampuan 4C;
- 3) Mendesiminasikan poin 1 dan 2 kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah

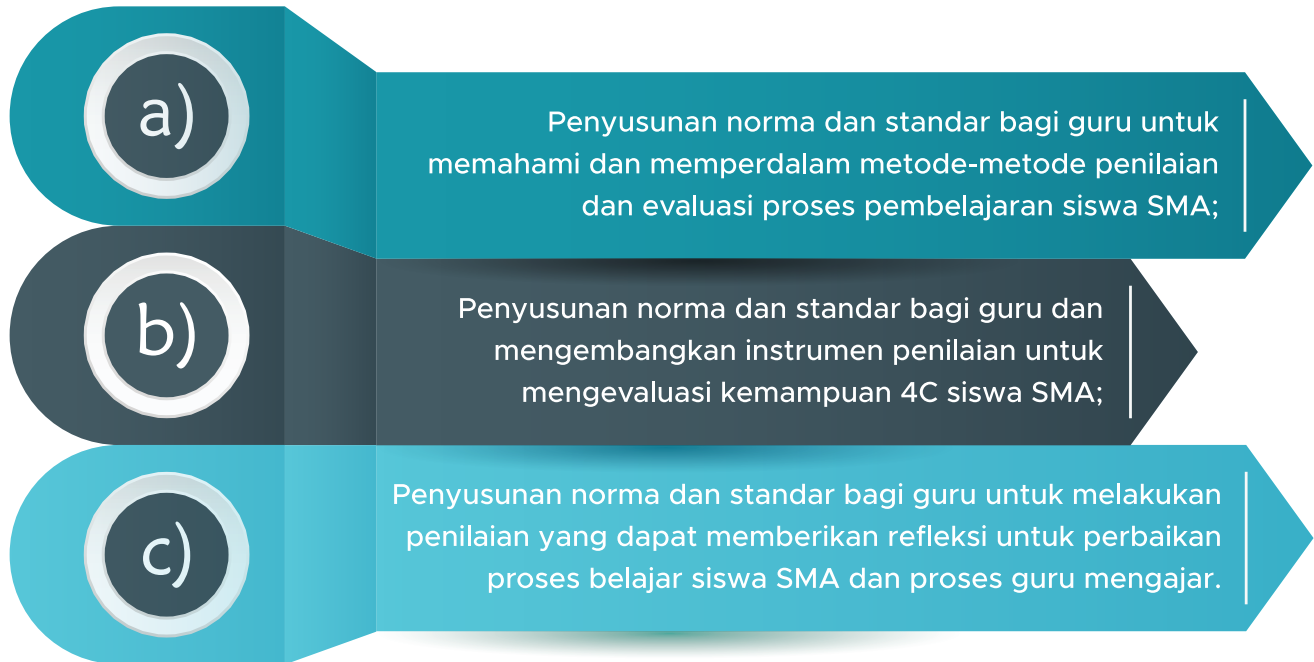
b) Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) Berkolaborasi dengan Direktorat SMA untuk melakukan pembinaan pada sekolah dalam upaya memperkuat kualitas penilaian guru;
- 2) Melakukan supervisi ke sekolah dalam upaya memperkuat kualitas penilaian guru.

c) Sekolah

- 1) Memfasilitasi guru untuk dapat meningkatkan kualitas penilaian;
- 2) Merefleksikan informasi dari Direktorat dan Dinas Pendidikan dalam upaya memperkuat kualitas penilaian guru;
- 3) Menyusun dan mengimplementasikan program peningkatan kualitas penilaian guru.

Program-program Peningkatan Kualitas Penilaian SMA (3)

- 
- a) Penyusunan norma dan standar bagi guru untuk memahami dan memperdalam metode-metode penilaian dan evaluasi proses pembelajaran siswa SMA;
 - b) Penyusunan norma dan standar bagi guru dan mengembangkan instrumen penilaian untuk mengevaluasi kemampuan 4C siswa SMA;
 - c) Penyusunan norma dan standar bagi guru untuk melakukan penilaian yang dapat memberikan refleksi untuk perbaikan proses belajar siswa SMA dan proses guru mengajar.

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Bagi Peserta Didik SMA (1)

Rasional Program

- a) Masih banyak terjadi kasus tindak kekerasan / *bullying* / perundungan di sekolah;
- b) Masih banyak sekolah yang belum bisa menyediakan layanan Pendidikan yang ramah anak.

Tujuan Program

- a) Menekan kasus tindak kekerasan/*bullying*/perundungan di sekolah;
- b) Meningkatkan pengetahuan sekolah dalam pencegahan tindak kekerasan/*bullying*/perundungan;
- c) Meningkatkan pengetahuan sekolah terhadap penyediaan layanan Pendidikan yang ramah anak.

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan bagi Peserta Didik SMA (2)

Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya

a) Direktorat SMA

- 1) Menyusun norma dan prosedur tentang pencegahan tindak kekerasan di sekolah dan penyediaan layanan Pendidikan di sekolah yang ramah anak;
- 2) Mendesiminasikan norma dan prosedur tersebut ke Dinas Pendidikan dan Sekolah.

b) Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) Berkolaborasi dengan Direktorat dan sekolah mensosialisasikan norma dan prosedur layanan yang disusun Direktorat ke sekolah;
- 2) Melakukan supervisi ke sekolah dalam upaya memperkuat upaya pencegahan tindak kekerasan dan peningkatan layanan Pendidikan yang ramah anak.

c) Sekolah

- 1) Memfasilitasi guru untuk dapat mencegah tindak kekerasan dan meningkatkan layanan Pendidikan yang ramah anak;
- 2) Mencerna informasi dari Direktorat dan Dinas Pendidikan dalam upaya memperkuat pencegahan perilaku kekerasan dan peningkatan layanan Pendidikan yang ramah anak;
- 3) Menyusun dan mengimplementasikan program pencegahan tindak kekerasan dan peningkatan layanan Pendidikan yang ramah anak.

Program-program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Bagi Peserta Didik SMA (3)

Penyusunan norma dan standar peningkatan kualitas layanan peserta didik seperti:

- a) pencegahan dan penanganan tindak kekerasan (*bullying*) di SMA;
- b) pengelolaan sekolah ramah anak di SMA;
- c) program-program peningkatan kualitas layanan peserta didik lainnya.



Peningkatan Kualitas Tata Kelola SMA Melalui Sekolah Penggerak (1)

Alasan & Tujuan

- a) Sekolah penggerak mempunyai karakteristik dimana kepala sekolah mempunyai kepemimpinan yang mampu menggerakkan guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa (*instructional leadership*);
- b) Sekolah penggerak mempunyai guru-guru yang mampu memberikan metode belajar yang menyenangkan dan memacu siswa untuk berfikir kritis, kolaboratif dan kreatif;
- c) Sekolah penggerak diharapkan menjadi panutan, inspirasi, tempat pelatihan bagi sekolah lainnya.

Tujuan Program

- a) Mengidentifikasi sekolah penggerak diberbagai daerah sebagai acuan (*benchmark*) bagi sekolah lainnya;
- b) Menyediakan konsep dan kerangka teknis untuk implementasi kerjasama antara sekolah penggerak dan sekolah lainnya;
- c) Mengidentifikasi kerjasama antara organisasi di luar sekolah dengan sekolah dalam dalam upaya peningkatan kualitas belajar siswa;
- d) Menginisiasi kerjasama antara organisasi di luar sekolah dengan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas belajar siswa.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan SMA Melalui Sekolah Penggerak (2)

Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya

a) Sekolah

- 1) Sekolah penggerak melaksanakan kerjasama dengan sekolah lainnya dalam upaya peningkatan kualitas belajar siswa;
- 2) Sekolah penggerak dan sekolah lainnya bekerjasama (baik antar sekolah atau dengan organisasi di luar sekolah dalam upaya peningkatan kualitas belajar siswa).

b) Direktorat SMA

- 1) Mengidentifikasi sekolah penggerak di berbagai daerah dengan kriteria yang relevan;
- 2) Menyediakan norma dan prosedur untuk kerjasama antar sekolah penggerak dan sekolah lainnya;
- 3) Mengidentifikasi kerjasama antara organisasi di luar sekolah dengan sekolah penggerak dan sekolah lainnya;
- 4) Menyediakan norma dan prosedur untuk kerjasama antara organisasi di luar sekolah dengan sekolah penggerak dan sekolah lainnya.
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan kerjasama antara sekolah penggerak, sekolah lain dan organisasi di luar sekolah.

c) Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) berkoordinasi dengan Direktorat SMA dan sekolah dalam supervise dan evaluasi kerjasama sekolah penggerak, sekolah lain, dan organisasi di luar sekolah.

Program-program Peningkatan Kualitas Pengelolaan SMA Melalui Sekolah Penggerak (3)

- a) Identifikasi Sekolah-sekolah penggerak di jenjang Pendidikan SMA;
- b) Penyusunan norma dan standar kerjasama antara SMA penggerak dan SMA lainnya;
- c) Identifikasi kerjasama antara organisasi Pendidikan dan SMA untuk peningkatan kualitas pengelolaan Pendidikan;
- d) Penyusunan norma dan standar kerjasama antara organisasi Pendidikan dengan SMA;
- e) Penyusunan norma dan standar peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah berfokus pada peningkatan kualitas proses belajar siswa (*instructional leadership*);
- f) Penyusunan norma dan standar peningkatan kemampuan profesional guru dan kepala sekolah melalui pengembangan budaya belajar untuk kepala sekolah dan guru (3 series buku, terdiri dari budaya sekolah, kepemimpinan sekolah, dan teknis implementasi)

*Mendeka
Belajar*

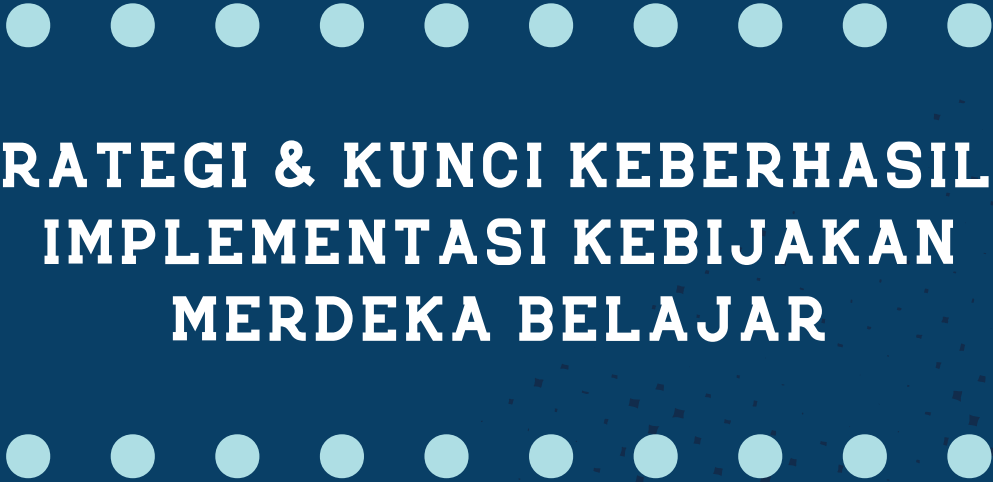
Substansi Merdeka Belajar yang menjadi perhatian Mendikbud adalah ingin menciptakan suasana belajar di sekolah dengan suasana yang menggembirakan.





“Pengaruh pengajaran itu umumnya
memerdekakan manusia atas hidupnya lahir,
sedang merdekanya hidup batin terdapat dari
pendidikan”

Ki Hajar Dewantara



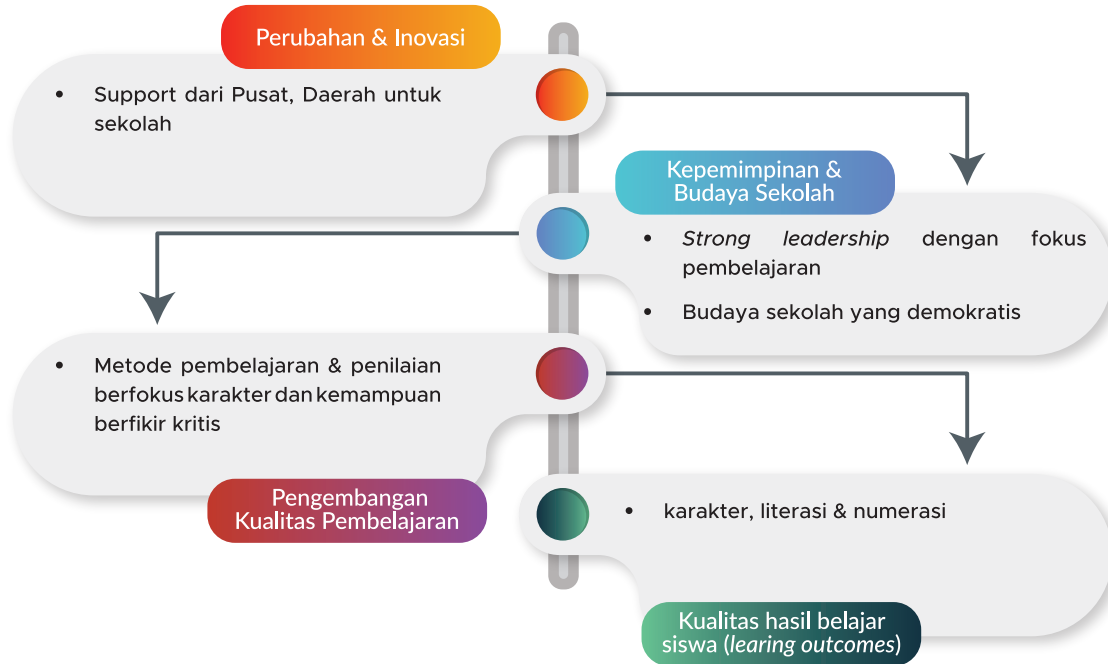
STRATEGI & KUNCI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR



Apa strategi untuk keberhasilan Merdeka Belajar?

- a) Merubah cara kita berfikir (visi, belief, & perilaku) — seluruh *stakeholders* Pendidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seharusnya mempunyai tujuan bersama, yaitu memberikan layanan Pendidikan yang berkualitas bagi siswa;
- b) Penguatan kapasitas kepala sekolah & guru — tentang kepemimpinan kepala sekolah (e.g., sebagai pemimpin instruksional), tata kelola sekolah (perencanaan, pembiayaan, pengembangan guru), pengembangan kualitas kurikulum, pembelajaran dan assessmen;
- c) Budaya organisasi sekolah yang demokratis — menghilangkan budaya birokratis (ABS), kepala sekolah sebagai pemilik otoritas tunggal.

Apa kunci keberhasilan implementasi kebijakan Merdeka Belajar?



Backward mapping peningkatan kualitas hasil belajar siswa, Caldwell & Spinks (1998) *The Self Managing School*

Apa yang dimaksud dengan Inovasi?

- a) Kebijakan merdeka belajar akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas belajar siswa, jika diikuti dengan inovasi sekolah yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas belajar siswa;
- b) Inovasi adalah usaha yang dilakukan sekolah dalam mengembangkan ide, upaya, program, kegiatan yang baru atau berbeda, baik secara kualitas dan kuantitas, dengan apa yang telah sekolah lakukan sebelumnya;
- c) Inovasi bersumber dari adanya kreativitas. Kreativitas adalah memikirkan ide baru, sedangkan inovasi berarti mengimplementasikan ide baru tersebut.

Apa yang diperlukan sekolah untuk Inovasi?

Inovasi memerlukan 3 (tiga) tahapan utama, yaitu:

- a) ide atau gagasan;
- b) implementasi atau manifestasi dari gagasan tersebut dan;
- c) *outcome* atau hasil dari implementasi gagasan tersebut dan terjadinya perubahan yang lebih baik.

Apa yang disiapkan sekolah untuk Inovasi?

Kepala sekolah, guru, dan siswa serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan perlu memikirkan hal-hal sebagai berikut untuk berinovasi:

- a) Strategi-strategi mengajar atau proses belajar apa sajakah yang paling bermanfaat untuk meningkatkan proses belajar siswa?
- b) Apa kontribusi strategi-strategi tersebut terhadap kualitas proses dan hasil belajar siswa?
- c) Strategi mana yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa?
- d) Bagaimana strategi tersebut bisa diimplementasikan?
- e) Bagaimana memaksimalkan strategi tersebut untuk pengembangan proses dan hasil belajar siswa?

Proses sekolah untuk Inovasi?

Inovasi yang menghasilkan perubahan yang baik memerlukan proses yang mendalam dan memerlukan siklus mencoba, gagal, perbaiki, berhasil. Beberapa tahap yang perlu sekolah pahami meliputi:

- a) Kesadaran (*awareness*);
- b) Ketertarikan (*Interest*);
- c) Mencari tahu atau memahami (*evaluation*);
- d) Mencoba (*trial*);
- e) Mengimplementasikan (*adoption*).

Pesan Mas Menteri dalam Berinovasi

Untuk berinovasi
warga sekolah dan
stakeholder Pendidikan
perlu melakukan proses
“banyak tanya, banyak
coba, banyak karya”

Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim (2020)



Tujuan Inovasi di Sekolah

Inovasi sekolah yang berhasil akan menghasilkan perubahan multidimensional (dalam berbagai aspek) menuju peningkatan kualitas guru mengajar dan siswa belajar, yaitu:

- a) tujuan dan visi guru mengajar — misal: berfokus pada siswa berdasarkan perkembangan belajarnya secara individual;
- b) belief dan asumsi guru terhadap pengajaran — misal: tugas guru adalah menginspirasi siswa untuk mempunyai rasa ingin tahu dan semangat belajar, pengajaran yang baik akan tercapai apabila ada hubungan yang baik dan saling percaya (trust) antara guru dan siswa, semua siswa pintar dan dapat berhasil jika guru memberikan dukungan yang mereka perlukan;
- c) praktik / strategi guru mengajar — misal: interaktif dan dialogis melalui diskusi dua arah antara guru dan siswa;



Kesimpulan

Merdeka Belajar memberikan otoritas dan fleksibilitas pengelolaan Pendidikan di level Sekolah

Otoritas dan fleksibilitas tidak akan berkontribusi positif untuk mencapai tujuan Pendidikan, jika tidak ada kreativitas dan inovasi

Untuk dapat menjadi kreatif dan inovatif, kita harus melakukan perubahan / hijrah / *change*

Penutup

Peningkatan kualitas hasil belajar siswa (karakter, *literacy* dan *numeracy*) dalam kebijakan merdeka belajar dapat tercapai **hanya jika** terjadi perubahan dan inovasi di level sekolah;

Sekolah menjadi aktor utama dalam upaya untuk berubah dan berinovasi, namun demikian sekolah akan mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta warga sekolah;

Perubahan dan inovasi sekolah harus difokuskan pada: (1) aspek kualitas kepemimpinan kepala sekolah berorientasi pada proses belajar siswa (*instructional leadership*), (2) aspek peningkatan budaya sekolah yang demokratis, (3) aspek peningkatan kualitas kurikulum, pembelajaran dan penilaian;

Perubahan dan inovasi tersebut dapat tercapai **hanya jika seluruh** pemangku kepentingan Pendidikan (sekolah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan warga sekolah) mempunyai visi, cara berfikir, dan tujuan yang sama yaitu memberikan layanan Pendidikan yang berkualitas bagi siswa.

Pengarah

Drs. Purwadi Sutanto, M. Si

Penyusun

1. Dhini Fatmi Nurbani
2. Dirjo Ardijansah
3. Winner Jihad Akbar
4. Irfan Hary Prasetya
5. Wiwiet Heriyanto

